**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATRA BARAT**

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keungan Negara

Mengatur tentang pengelolaan Keuangan Negara yang meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara, asas umum pengelolaan keungan Negara, kekuasaan umum pengelolaan keungan Negara, penyusanan dan penetapan APBN/APBD pelaksanaan dan penangungjawaban APBN/APBD, hubungan keungan antara pemerintah pusat sentral. Pemerintah lembaga asing, perusahaan Negara daerah, swasta dan pengelola dana masyarakat.

1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan atau penatausahaaan dan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan pelaksanaan Negara atau Daerah, yang meliputu ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan penjabat, perbendaharaan Negara, pelaksanaan APBN/APBD, pengelolaan utang piutang Negara atau Daerah, pengelolaan investasi Negara atau Daerah. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD, pengelolaan BLUD.

1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertangungjawaban keuangan Negara.
2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tantang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiaonal.
4. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah.
5. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan.
6. PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntasi pemerintahan.
7. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
8. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor35 Tahun*.* 2009 tentang PolaPengelolaan KeuanganBadan.
11. Peraturan Gubernur *(*PERGUB*)* ProvinsiSumatera BaratNomor9 Tahun 2016 Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota.
12. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30).